

LAPORAN KEGIATAN DAN POLICY BRIEF  
*RoundTable Discussion*

# **Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: “Jawa Timur Dapat Apa?”**



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Diskusi Meja Bundar “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?” yang diselenggarakan pada 2 Desember 2025 di Surabaya dapat terlaksana dengan lancar dan menghasilkan berbagai pemikiran strategis yang sangat berharga. Laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi resmi atas keseluruhan rangkaian acara, termasuk paparan para narasumber, pandangan pemangku kepentingan, serta rekomendasi kebijakan yang muncul dari proses diskusi.

Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian program Round Table Discussion di sepuluh kota di Indonesia yang diinisiasi oleh Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored, dengan dukungan AFU.ID, PatraData Research, PWI Jawa Timur, serta berbagai mitra strategis lainnya. Kegiatan ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan akademisi, pelaku usaha, pemerintah daerah, BUMN, serta masyarakat sipil untuk membahas secara terbuka arah reformasi BUMN, terutama dalam konteks pembentukan Danantara sebagai entitas baru superholding BUMN.

Jawa Timur, sebagai provinsi penyumbang 14,54% PDB nasional dan motor pertumbuhan industri manufaktur Indonesia, memiliki kepentingan besar terhadap arah transformasi BUMN. Melalui forum ini, berbagai suara dari daerah—mulai dari pemerintah provinsi dan kota, DPR RI, pengusaha, koperasi, hingga perbankan daerah—mengemukakan harapan, kekhawatiran, serta gagasan konstruktif mengenai masa depan BUMN dan dampaknya bagi perekonomian Jawa Timur. Seluruh pandangan tersebut dihimpun dan diolah sebagai masukan penting bagi perumusan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, dan pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada Nagara Institute atas pemaparan riset mendalam yang menjadi fondasi diskusi, serta kepada Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, dan mitra strategis lainnya atas kontribusi pemikiran yang sangat bernilai.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan publik yang membutuhkan rujukan terkait perkembangan reformasi BUMN dan implikasinya terhadap pembangunan daerah. Kami berharap dialog seperti ini dapat terus diperluas dan menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.

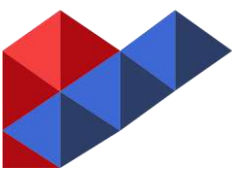
Surabaya, Desember 2025

**Panitia Penyelenggara**



## DAFTAR ISI

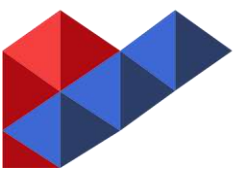
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Kegiatan.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan .....	4
1.3 Waktu dan Tempat Kegiatan .....	5
1.4 Peserta Kegiatan.....	5
1.5 Susunan Acara .....	6
1.6 Matriks Pelaksanaan Kegiatan .....	6
BAB II LAPORAN SINGKAT HASIL KEGIATAN.....	7
2.1 Konteks dan Tujuan Strategis.....	7
2.2 Isu-Isu Kunci yang Mengemuka .....	7
2.3 Ragam Pandangan dan Perdebatan Kebijakan .....	11
2.4 Perspektif dan Kepentingan Strategis Jawa Timur.....	15
2.5 Peluang Kebijakan dan Risiko yang Diantisipasi .....	17
2.6 Catatan Strategis bagi Pemerintah Pusat.....	20
2.7 Kesimpulan.....	23
BAB III DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI.....	25
3.1 Dokumentasi Kegiatan.....	25
3.2 Laporan Singkat <i>Social Media Handling</i> .....	28
BAB IV PENUTUP .....	32
LAMPIRAN .....	34





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Acara .....	6
Tabel 1.2 Matriks Pelaksanaan Kegiatan.....	6
Tabel 3.1 Dokumentasi Kegiatan.....	25
Tabel 3.1 Jumlah Total Post.....	29





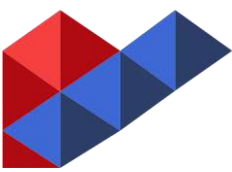
## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Kegiatan

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) adalah badan pengelola investasi strategis yang mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nama "Daya Anagata Nusantara" diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. "Daya" berarti energi, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia.

Untuk mencapai tujuan strategisnya, Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan menerapkan good governance. Danantara Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis, sehingga menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sorotan publik belakangan ini banyak mengarah kepada beleid yang ditujukan untuk memperbaiki penatalaksanaan Danantara, yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Beleid anyar tersebut mengatur pemisahan keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan semua BUMN dari keuangan negara. Sebagian kalangan akademisi

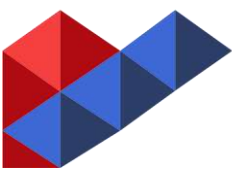




menilai, kebijakan ini bisa membuka celah baru bagi penyelewengan dana publik. Celah tersebut dinilai dapat menciptakan "zona abu-abu" yang menumpulkan pengawasan dan pengendalian aset negara di BUMN yang selama ini masuk dalam kategori "kekayaan negara yang dipisahkan". Implikasi lain dari pengecualian tersebut adalah keuntungan atau kerugian investasi Danantara tidak secara otomatis dianggap sebagai keuntungan atau kerugian negara. Padahal, dalam beleid terbaru, BPI Danantara punya kewenangan "super" untuk mengelola dividen BUMN, memberikan persetujuan penambahan atau pengurangan penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN, hingga merestui penghapusan buku atau hapus tagih atas aset BUMN.

Dengan mandat BPI Danantara yang semakin luas, ruang fiskal memang masih ada potensi tertekan karena kas negara masih akan terbebani tugas menyalurkan PMN untuk BUMN dan BPI Danantara. Belum lagi hasil dividen yang selama ini masuk ke kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi berkurang atau bahkan dividen dialokasikan semua ke pengelolaan BPI Danantara.

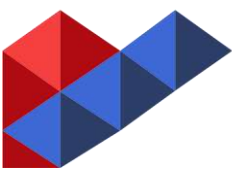
Salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan pada PMN tunai adalah membuka keran pendanaan alternatif. BPI Danantara kini tengah merumuskan berbagai opsi agar perusahaan pelat merah tidak terus menerus bergantung pada kas negara. Namun, perlu diingat bahwa tak semua opsi bebas risiko. Beberapa skema pendanaan alternatif justru bisa menjadi beban baru jika tak dikelola dengan hati-hati. Karena itu, variasi sumber pendanaan di luar APBN dipandang penting untuk menahan penumpukan beban fiskal.





Bagi BPI Danantara sendiri, tantangannya justru berlapis. Sebagai lembaga investasi yang baru berdiri, BPI Danantara dituntut untuk menyalurkan modal secara tepat sasaran, menghindari penyelewengan, sekaligus memastikan BUMN tidak terlena dengan kemudahan akses dana. Berbagai macam risiko akan dihadapi BPI Danantara, mulai dari kegagalan/kerugian bisnis/investasi, fraud keuangan, dan tekanan dari kepentingan pihak tertentu. Selain itu juga adanya risiko operasional berupa utang jangka pendek, fluktuasi nilai tukar, dan beban bunga yang membengkak. Begitu juga dengan risiko tuntutan hukum dari mitra bisnis/investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Menanggapi berbagai permasalahan risiko tersebut, BPI Danantara memerlukan upaya tata kelola yang fundamental untuk dapat mempercepat transformasi BUMN yang benar benar didambakan oleh pemerintah. Transformasi BUMN bukan hanya sekedar jargon saja namun sebuah keniscayaan agar dapat melaksanakan mandat baru dalam mewujudkan kemakmuran Indonesia.

Berangkat dari berbagai kondisi, tantangan dan urgensi yang telah dipaparkan di atas, diperlukan ruang dialog yang mampu mempertemukan para pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan dan perspektif, mengidentifikasi permasalahan lebih mendalam, serta merumuskan alternatif solusi yang relevan dan aplikatif bagi BPI Danantara. Atas dasar tersebut, Nagara Institute menyelenggarakan kegiatan *Round Table Discussion* (RTD) sebagai forum strategis untuk menggali pemahaman bersama, memperkuat kolaborasi dan menghasilkan input dan rekomendasi yang dapat





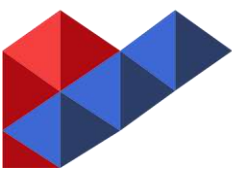
mendukung perumusan kebijakan maupun langkah tindak lanjut yang lebih efektif.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan *Round Table Discussion* (RTD) adalah untuk menghadirkan ruang dialog yang strategis antar pemangku kepentingan, akademisi, praktisi dan pihak terkait lainnya mengenai posisi BPI Danantara dalam ekosistem pengelolaan BUMN dan perekonomian nasional serta langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk memperkuat kontribusinya.

Secara umum, diskusi ini juga bertujuan menggali informasi, pandangan dan usulan serta solusi atas pokok-pokok pertanyaan berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi dan tantangan fundamental dalam penatakelolaan BUMN yang berpotensi mempengaruhi pengelolaan BPI Danantara, mencakup keberlangsungan usaha, kesehatan keuangan, serta kapasitas sumber daya yang dimiliki saat ini.
2. Menganalisis kebutuhan penguatan pada sisi input dan output kinerja BPI Danantara, meliputi kebutuhan strategis untuk memperkuat fondasi operasional dan investasi, serta langkah yang diperlukan untuk meningkatkan hasil dan dampak kinerja usaha.
3. Merumuskan strategi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan usaha sebagai prasyarat untuk memastikan keberlangsungan dan tata kelola BPI Danantara yang sehat, modern, dan berdaya saing.





### 1.3 Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan *Round Table Discussion (RTD)* “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN, Jawa Timur Dapat Apa?” diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 2 Desember 2025  
 Waktu : 08.00 - 12.00 WIB  
 Tempat : Hotel Wyndham Jl. Basuki Rahmat No.67-73,  
 Kota Surabaya

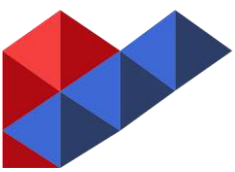


Gambar 1.1 Flyer Kegiatan Round Table Discussion “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?”

### 1.4 Peserta Kegiatan

Kegiatan *Round Table Discussion* ini melibatkan perwakilan ahli dan stakeholder BUMN dan Badan Pengatur BUMN dan BPI Danantara, di antaranya (daftar hadir terlampir):

1. Wali Kota Surabaya
2. Pimpinan BUMN di wilayah Jawa Timur
3. Akademisi Perguruan Tinggi di Jawa Timur
4. Peneliti dan Wartawan
5. Asosiasi Bisnis dan Investasi
6. Pelaku Usaha dan Praktisi Ekonomi





## 1.5 Susunan Acara

Tabel 1.1 Susunan Acara

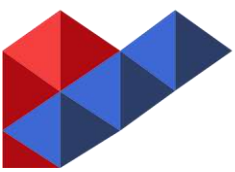
No	Waktu	Durasi (Menit)	Acara	Narasumber/PIC
1	08.30 - 09.00	30	Registrasi Peserta & Penyambutan	Panitia Penyelenggara
2	09.00 - 09.05	5	Pembukaan oleh Master of Ceremony	Tri Ambarwati
3	09.05 - 09.15	10	Pembukaan dan Pengantar oleh Direktur Eksekutif	Dr. Akbar Faizal, M.Si
4	09.15 - 09.30	15	Paparan Temuan Awal Tim Riset Nagara Institute	Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
5	09.30 - 09.45	15	Paparan Temuan Awal Tim Riset Nagara Institute	Dr. R. Edi Soewandono, S.H., M.H
6	09.45 - 10.45	60	Paparan Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H. M. Misbakhun, S.E., M.H</li> <li>• Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc.</li> <li>• Prof. Dr. Imron Mawardi, S.P., M.Si.</li> <li>• Ferry Latuhihin, S.E., M.B.A</li> </ul>
7	10.45 - 11.50	50	Diskusi Panel & Tanya Jawab	Peserta RTD dan Narasumber
8	11.50 - selesai		Penutup, Foto Bersama & Makan Siang	

## 1.6 Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Matriks pelaksanaan kegiatan menyajikan tahapan dan jadwal terkait sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Kegiatan	November			Desember		
	Minggu ke-					
	2	3	4	1	2	3
Persiapan Kegiatan						
Pelaksanaan Kegiatan						
Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan						





## BAB II

### LAPORAN SINGKAT HASIL KEGIATAN

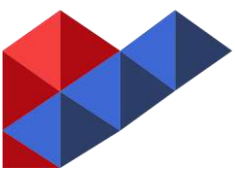
#### 2.1 Konteks dan Tujuan Strategis

Focus Group Discussion (FGD) ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian diskusi nasional lintas daerah yang dilaksanakan di sepuluh kota prioritas untuk menghimpun masukan strategis mengenai reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan Danantara. Jawa Timur dipilih sebagai lokasi awal dengan mempertimbangkan perannya yang strategis sebagai salah satu kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto nasional, simpul logistik kawasan Indonesia Timur, serta lokasi operasional sejumlah BUMN strategis.

Diskusi diarahkan untuk mensinkronkan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan dan realitas pembangunan daerah, serta menangkap pandangan lintas pemangku kepentingan mengenai implikasi transformasi BUMN terhadap perekonomian nasional dan regional. Forum ini juga bertujuan mengidentifikasi peluang, risiko, dan prasyarat tata kelola agar reformasi BUMN melalui Danantara tidak berhenti pada perubahan struktural semata, tetapi menghasilkan dampak ekonomi riil yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

#### 2.2 Isu-Isu Kunci yang Mengemuka

Diskusi menyoroti sejumlah isu struktural yang menjadi dasar pembentukan dan operasionalisasi Danantara sebagai instrumen reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya:

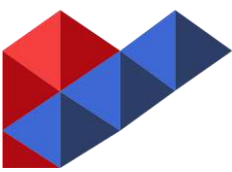




#### A. Isu Struktural Kinerja dan Efisiensi BUMN

Diskusi menyoroti persoalan kinerja dan efisiensi BUMN yang masih relatif rendah sebagai isu mendasar yang melatarbelakangi pembentukan dan operasionalisasi Danantara. Kondisi ini tercermin dari terbatasnya rasio pengembalian aset dan perputaran usaha, tingginya tingkat liabilitas, serta ketergantungan sebagian BUMN pada penyertaan modal negara dan penugasan pelayanan publik. Fragmentasi pengelolaan aset dan kesenjangan kinerja antar-BUMN dipandang menghambat optimalisasi peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Secara lebih rinci, data riset awal menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA) rata-rata BUMN berada pada kisaran 3,05 persen dan Return on Equity (ROE) sekitar 15,6 persen, dengan rasio total asset turnover yang sangat rendah pada kisaran 0,3. Dari total 102 perusahaan negara, tingkat liabilitas tercatat tinggi sehingga menimbulkan risiko utang yang signifikan. Kontribusi riil BUMN terhadap Produk Domestik Bruto nasional masih berada di bawah 10 persen apabila dihitung berdasarkan nilai riil, atau sekitar di bawah 24 persen secara nominal. Selain itu, terjadi konsentrasi kontribusi yang ekstrem, di mana dari 15 perusahaan penyumbang dividen terbesar, hanya tujuh entitas yang memberikan kontribusi positif secara signifikan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa permasalahan BUMN bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial.





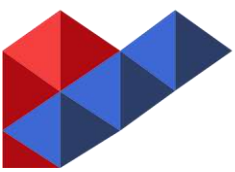
## B. Arsitektur Kelembagaan dan Desain Danantara

Aspek hukum dan kelembagaan menjadi perhatian penting dalam diskusi, khususnya terkait proses panjang perubahan Undang-Undang BUMN yang melahirkan Danantara sebagai badan pengelola investasi dan aset negara. Diskusi menekankan perlunya kejelasan struktur kepemilikan saham, komposisi dan peran dewan komisaris, pembatasan rangkap jabatan pejabat negara, serta diferensiasi fungsi Danantara dengan lembaga investasi negara lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih mandat dan pelemahan akuntabilitas.

Dalam kerangka desain kelembagaan, reformasi diarahkan pada pengalihan BUMN dari beban kepentingan politik jangka pendek menuju entitas korporasi yang dikelola secara profesional melalui Danantara yang memiliki dua pilar utama. Danantara Asset Management berfokus pada perbaikan tata kelola operasional, peningkatan efisiensi, serta optimalisasi aset melalui konsolidasi dan merger untuk merampingkan struktur organisasi dan memperbaiki kinerja perusahaan. Sementara itu, Danantara Investment diarahkan untuk mengakselerasi investasi di bidang infrastruktur dan proyek strategis nasional guna meningkatkan profitabilitas, memperkuat kemandirian finansial BUMN, serta mendukung agenda pembangunan jangka panjang negara.

## C. Konsolidasi Aset dan Risiko Sistemik

Konsolidasi aset BUMN ke dalam satu entitas besar dinilai memiliki potensi sekaligus risiko yang signifikan. Di satu sisi, konsolidasi dipandang sebagai sarana untuk memperkuat daya kelola, skala investasi, dan posisi tawar negara dalam perekonomian global.





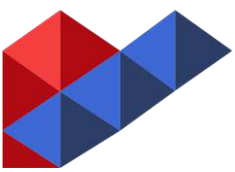
Pengelolaan terpusat diharapkan mampu mengurangi fragmentasi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pengambilan keputusan strategis.

Di sisi lain, diskusi menyoroti kekhawatiran bahwa konsolidasi tersebut dapat menyatukan aset produktif dan tidak produktif tanpa mekanisme valuasi, pemulihan, dan strategi perbaikan kinerja yang jelas. Tanpa pemetaan kualitas aset yang komprehensif, Danantara berpotensi menjadi wadah akumulasi aset bermasalah. Risiko lain yang diidentifikasi meliputi potensi politisasi, konflik kepentingan, praktik monopoli, serta meningkatnya kerentanan terhadap guncangan ekonomi global akibat konsentrasi aset dalam satu entitas.

#### D. Relasi Pusat–Daerah dan Dampak Ekonomi Lokal

Relasi antara Danantara dan perekonomian daerah menjadi isu krusial dalam diskusi. Sentralisasi dividen dan pengambilan keputusan investasi di tingkat pusat dikhawatirkan dapat mengurangi ruang pertumbuhan ekonomi lokal serta kemampuan reinvestasi BUMN di wilayah operasionalnya. Kondisi ini berpotensi melemahkan kontribusi BUMN terhadap pembangunan daerah apabila tidak disertai mekanisme koordinasi yang memadai.

Dari perspektif daerah, khususnya Jawa Timur, disoroti bahwa meskipun banyak BUMN strategis beroperasi di wilayah tersebut, dampak fiskal dan ekonomi yang dirasakan daerah masih terbatas, sementara beban eksternalitas seperti kerusakan infrastruktur ditanggung oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, muncul harapan agar Danantara tidak memposisikan daerah semata sebagai objek kebijakan pusat, melainkan sebagai mitra strategis yang dilibatkan sejak





tahap perencanaan hingga implementasi investasi, termasuk dalam optimalisasi aset BUMN yang belum produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

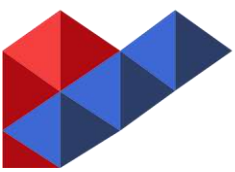
#### E. Batas Peran Negara dan Interaksi dengan Sektor Swasta

Diskusi juga mengangkat persoalan batas peran negara dalam kegiatan usaha sebagai isu strategis. Kekhawatiran muncul terkait potensi BUMN bersaing langsung dengan sektor swasta, koperasi, dan pelaku usaha lokal di sektor-sektor yang sebenarnya telah mampu dikelola secara efisien oleh mekanisme pasar. Kehadiran negara yang terlalu luas dalam sektor non-strategis dipandang berisiko menghambat pertumbuhan kewirausahaan, inovasi, dan kompetisi yang sehat.

Dalam konteks ini, penegasan batas peran negara dipandang penting untuk menjaga keseimbangan antara fungsi negara sebagai pengelola aset strategis dan peran pasar dalam mendorong efisiensi ekonomi. Reformasi BUMN melalui Danantara diharapkan mampu memperjelas garis demarkasi tersebut, sehingga negara dapat fokus pada sektor-sektor strategis yang menyangkut kepentingan publik luas, sementara sektor swasta, koperasi, dan UMKM tetap memiliki ruang tumbuh yang adil dan berkelanjutan.

### 2.3 Ragam Pandangan dan Perdebatan Kebijakan

Transformasi BUMN melalui pembentukan Danantara tidak hanya dipahami sebagai persoalan desain kelembagaan dan kinerja korporasi, tetapi juga sebagai arena perdebatan kebijakan yang mencerminkan





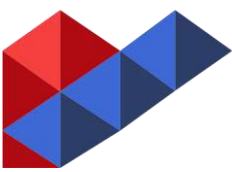
pilihan strategis negara dalam mengelola hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat. Diskusi menunjukkan bahwa reformasi ini menyentuh isu-isu fundamental yang melampaui aspek teknokratis, mulai dari redefinisi peran negara dalam kegiatan usaha, efektivitas arsitektur kelembagaan investasi negara, hingga dampaknya terhadap ekosistem ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah. Ragam pandangan yang muncul merefleksikan perbedaan perspektif, kepentingan, dan pengalaman aktor kebijakan dalam memandang arah transformasi BUMN ke depan.

Dalam konteks tersebut, perdebatan yang mengemuka dapat dikelompokkan ke dalam beberapa isu utama berikut.

#### A. Spektrum Pandangan atas Reformasi BUMN dan Danantara

Diskusi mencerminkan spektrum pandangan yang luas mengenai arah reformasi BUMN dan desain Danantara. Sejumlah pembicara memandang pembentukan Danantara sebagai puncak dari proses panjang transformasi BUMN yang telah dirancang sejak akhir 1990-an, dengan tujuan memurnikan BUMN sebagai entitas korporasi yang efisien, profesional, dan akuntabel, tidak lagi dibebani fungsi politik serta penugasan yang tidak ekonomis. Dalam pandangan ini, konsolidasi dan reformasi tata kelola BUMN dipandang sebagai prasyarat agar BUMN dapat berkontribusi secara lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari perspektif hukum, ditegaskan bahwa Danantara harus memiliki landasan undang-undang yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan publik. Perdebatan juga muncul mengenai posisi Danantara sebagai super





holding investasi, mengingat telah adanya lembaga pengelola investasi negara lain dengan fungsi yang relatif serupa. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan kejelasan mandat dan diferensiasi kelembagaan yang tegas agar reformasi tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan tata kelola.

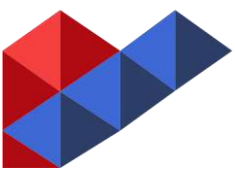
#### B. Redefinisi Peran Negara dalam Kegiatan Usaha

Salah satu perdebatan paling tajam berkaitan dengan batas peran negara dalam aktivitas bisnis. Sejumlah peserta mengkritisi praktik BUMN yang merambah sektor-sektor non-strategis, seperti perhotelan dan real estat, yang dinilai berpotensi mendistorsi mekanisme pasar dan mengurangi ruang tumbuh sektor swasta, koperasi, serta pelaku usaha lokal. Pandangan ini menekankan perlunya negara kembali memfokuskan perannya pada penyediaan public goods dan pengelolaan cabang-cabang produksi penting yang memiliki dampak luas bagi hajat hidup orang banyak.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menegaskan bahwa kehadiran negara tetap krusial dalam sektor-sektor strategis seperti energi, pangan, dan infrastruktur dasar, terutama ketika sektor swasta tidak memiliki insentif atau kapasitas untuk berinvestasi dalam skala besar dan jangka panjang. Perdebatan ini menunjukkan pentingnya penegasan garis demarkasi yang jelas antara sektor strategis yang memerlukan kehadiran negara dan sektor non-strategis yang sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar yang kompetitif.

#### C. Dualisme Kelembagaan dan Efektivitas Investasi Negara

Diskusi juga menyoroti potensi dualisme kelembagaan dalam pengelolaan investasi negara, khususnya terkait keberadaan Danantara





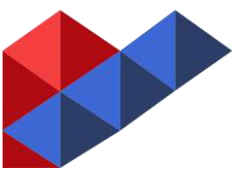
dan Indonesia Investment Authority (INA). Muncul kekhawatiran mengenai apakah Danantara akan berfungsi sebagai mesin pencipta nilai (value creation) melalui pengelolaan aset yang sehat dan profesional, atau justru menjadi wadah konsolidasi aset bermasalah yang sulit direhabilitasi apabila tidak disertai mekanisme seleksi, valuasi, dan pemulihan aset yang ketat.

Selain itu, klaim besaran nilai aset Danantara yang mencapai sekitar Rp15.000 triliun juga menjadi bahan perdebatan. Sejumlah peserta menekankan bahwa angka nominal tersebut belum mencerminkan net worth maupun kapasitas investasi riil apabila tidak dibarengi dengan aset yang layak secara operasional dan finansial (flyable assets). Tanpa kejelasan mengenai kualitas aset dan kemampuan menghasilkan arus kas berkelanjutan, terdapat risiko bahwa konsolidasi aset justru melemahkan efektivitas investasi negara dalam jangka menengah dan panjang.

#### D. Dampak terhadap Ekonomi Kerakyatan dan Ekosistem Lokal

Dari perspektif ekonomi kerakyatan, muncul kekhawatiran terkait potensi persaingan asimetris antara BUMN dan pelaku usaha mikro, koperasi, serta lembaga keuangan lokal. Beberapa peserta menyoroti pengalaman sektor koperasi dan usaha mikro yang merasakan tekanan akibat kehadiran lembaga keuangan mikro milik BUMN, seperti Mekar/PNM, yang dinilai memiliki keunggulan struktural dalam akses pendanaan dan dukungan negara.

Praktik persaingan yang dianggap tidak setara, termasuk penerapan sistem tanggung renteng, dipandang berpotensi menggerus ekosistem koperasi lokal apabila tidak diimbangi dengan regulasi



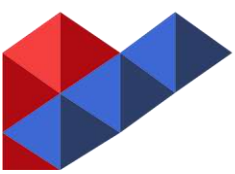


perlindungan yang memadai. Dalam konteks ini, diskusi menegaskan bahwa transformasi BUMN melalui Danantara perlu dirancang secara hati-hati agar tidak mematikan ekonomi kerakyatan, melainkan justru memperkuat sinergi antara BUMN, koperasi, UMKM, dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

#### 2.4 Perspektif dan Kepentingan Strategis Jawa Timur

Dari perspektif daerah, Jawa Timur menempatkan kebijakan pembentukan Danantara dalam konteks kebutuhan nyata pembangunan wilayah. Sebagai kontributor sekitar 14,54 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional sekaligus gerbang logistik kawasan Indonesia Timur, Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional. Provinsi ini ditopang oleh basis industri manufaktur, perdagangan, dan pertanian yang kuat, namun masih menghadapi tantangan struktural berupa ketimpangan penyerapan tenaga kerja, keterbatasan lahan, serta kesenjangan nilai tambah antarwilayah.

Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal menyoroti bahwa meskipun banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis beroperasi di Jawa Timur, dampak fiskal dan ekonomi yang dirasakan daerah masih relatif terbatas. Di sisi lain, pemerintah daerah menanggung berbagai eksternalitas, seperti tekanan terhadap infrastruktur perkotaan dan wilayah industri, tanpa diimbangi dengan aliran manfaat ekonomi yang proporsional. Kondisi ini memunculkan harapan agar Danantara tidak memosisikan daerah semata sebagai objek kebijakan pusat, melainkan sebagai mitra strategis yang dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga implementasi investasi.

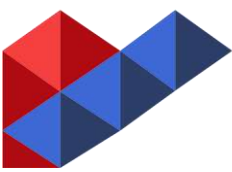




Salah satu isu konkret yang mengemuka adalah optimalisasi aset BUMN yang belum produktif, khususnya lahan dan bangunan yang terbengkalai di lokasi-lokasi strategis perkotaan seperti Surabaya. Daerah memandang aset-aset tersebut sebagai potensi ekonomi yang belum tergarap dan mendorong adanya terobosan hukum serta penyederhanaan koordinasi lintas korporasi negara agar aset idle dapat dimanfaatkan secara produktif. Optimalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi lokal tanpa terhambat oleh ego sektoral masing-masing BUMN.

Selain itu, diskusi menyoroti perlunya percepatan proyek-proyek strategis daerah yang selama ini dinilai berjalan stagnan, termasuk proyek-proyek yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi yang signifikan. Pemerintah daerah melihat peluang agar Danantara dapat berperan sebagai instrumen pembiayaan alternatif, termasuk melalui mekanisme pembiayaan inovatif seperti obligasi daerah (municipal bond), guna memecah kebuntuan fiskal dan mempercepat realisasi proyek infrastruktur dan kawasan industri strategis.

Isu koordinasi lintas BUMN dalam pembangunan infrastruktur perkotaan juga menjadi perhatian penting. Keluhan mengenai tumpang tindih dan inefisiensi pembangunan utilitas dasar, seperti jaringan kabel dan ducting, mencerminkan lemahnya integrasi perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Transformasi pengelolaan BUMN di bawah satu kerangka Danantara diharapkan mampu memperbaiki koordinasi tersebut, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih





efisien, terintegrasi, dan minim gangguan bagi aktivitas ekonomi dan masyarakat.

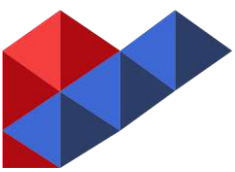
Dari sisi tata kelola fiskal daerah, muncul tuntutan agar investasi yang dilakukan di wilayah Jawa Timur memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah perlunya pembentukan badan hukum lokal bagi entitas investasi yang beroperasi di daerah, sehingga Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah tidak terkonsentrasi secara administratif di tingkat pusat, melainkan mengalir ke wilayah tempat investasi berlangsung. Dalam pandangan daerah, pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa konsolidasi aset dan investasi nasional melalui Danantara tetap sejalan dengan prinsip pemerataan manfaat ekonomi dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Secara keseluruhan, perspektif Jawa Timur menegaskan bahwa keberhasilan Danantara di tingkat daerah tidak hanya diukur dari besaran nilai aset atau volume investasi, tetapi dari kemampuannya menjembatani kepentingan nasional dan kebutuhan pembangunan lokal secara seimbang. Keterlibatan daerah sebagai mitra strategis, optimalisasi aset yang inklusif, serta distribusi manfaat ekonomi yang adil dipandang sebagai prasyarat penting agar transformasi BUMN benar-benar menghasilkan dampak ekonomi riil yang berkelanjutan.

## 2.5 Peluang Kebijakan dan Risiko yang Diantisipasi

### A. Peluang Kebijakan

Diskusi mengidentifikasi peluang kebijakan yang signifikan melalui pembentukan Danantara sebagai instrumen pengarah investasi jangka panjang, baik di tingkat nasional maupun daerah. Danantara dipandang

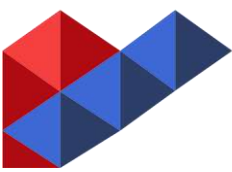




memiliki potensi untuk mengisi ruang investasi pada sektor-sektor strategis yang kurang diminati swasta, tetapi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar, seperti ketahanan pangan, pengolahan limbah, pengembangan energi alternatif, serta infrastruktur dasar. Dengan pendekatan investasi yang terkoordinasi dan berskala besar, Danantara diharapkan mampu memperkuat kapasitas negara dalam mendorong transformasi struktural perekonomian.

Dalam konteks Jawa Timur, peluang tersebut dipandang relevan untuk mendorong diversifikasi ekonomi regional. Investasi pada sektor-sektor seperti waste to energy, pengolahan limbah, dan peternakan modern dinilai berpotensi mempercepat kemandirian pangan dan energi daerah tanpa secara langsung membebani BUMN operasional. Selain itu, dengan kontribusi sektor manufaktur Jawa Timur yang mencapai sekitar 31,16 persen terhadap perekonomian daerah, reformasi BUMN melalui Danantara dipandang dapat memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan integrasi hulu-hilir, serta memperluas penyerapan tenaga kerja di sektor sekunder dan tersier.

Lebih jauh, Danantara juga dipandang berpotensi mendukung percepatan pembangunan kawasan industri, peningkatan konektivitas logistik, dan pengembangan ekonomi kawasan, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal. Melalui peran sebagai katalis investasi jangka panjang, Danantara diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengelola aset, tetapi juga sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di tingkat daerah.



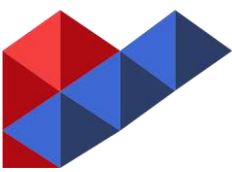


## B. Risiko yang Perlu Diantisipasi

Di sisi lain, diskusi menegaskan bahwa berbagai peluang tersebut hanya dapat terwujud apabila sejumlah risiko utama diantisipasi secara serius sejak tahap awal implementasi. Salah satu risiko yang menonjol adalah sentralisasi keputusan investasi dan penarikan dividen di tingkat pusat, yang berpotensi menimbulkan investment leakage, yaitu kondisi di mana keuntungan dari operasi BUMN di daerah tidak diimbangi dengan reinvestasi yang proporsional untuk pengembangan infrastruktur dan kapasitas ekonomi lokal. Risiko ini dipandang dapat melemahkan legitimasi kebijakan Danantara di mata pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Risiko tata kelola juga menjadi perhatian utama, mengingat besarnya nilai aset dan dana yang dikelola. Pengalihan aset dalam skala besar ke dalam satu entitas menyimpan potensi politisasi dan penyalahgunaan wewenang apabila tidak dibarengi dengan mekanisme pengawasan publik yang kuat, audit yang transparan, serta pelaporan berkala yang kredibel. Tanpa disiplin tata kelola yang tinggi, konsolidasi aset berisiko melahirkan persoalan baru yang berskala sistemik dan sulit dikoreksi dalam jangka panjang.

Selain itu, diskusi mengidentifikasi potensi resistensi struktural dari birokrasi internal BUMN terhadap perubahan manajemen yang berorientasi pada efisiensi, profitabilitas, dan disiplin kinerja yang lebih ketat. Resistensi ini, apabila tidak dikelola dengan strategi perubahan organisasi yang memadai, berpotensi menghambat implementasi reformasi dan mengurangi efektivitas Danantara sebagai instrumen transformasi BUMN. Risiko lain yang juga disoroti mencakup potensi



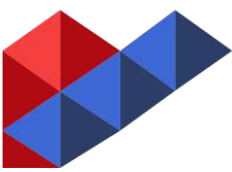


praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, tumpang tindih peran antara BUMN dan pelaku usaha swasta, koperasi, serta UMKM, serta kerentanan terhadap ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempengaruhi kinerja investasi.

Secara keseluruhan, diskusi menegaskan bahwa keberhasilan Danantara tidak hanya bergantung pada besarnya peluang investasi yang tersedia, tetapi pada kemampuan pemerintah mengelola risiko tata kelola, fiskal, dan kelembagaan secara disiplin dan konsisten. Tanpa prasyarat tersebut, peluang kebijakan yang besar berpotensi berubah menjadi sumber kerentanan baru bagi perekonomian nasional dan daerah.

## 2.6 Catatan Strategis bagi Pemerintah Pusat

Diskusi menegaskan bahwa reformasi Badan Usaha Milik Negara melalui pembentukan Danantara merupakan agenda kebijakan strategis yang memerlukan kejelasan mandat, konsistensi tata kelola, serta disiplin implementasi yang tinggi. Pemerintah pusat dipandang perlu mempertegas posisi Danantara dalam ekosistem kelembagaan investasi negara, termasuk diferensiasi fungsi yang jelas dengan lembaga sejenis seperti Indonesia Investment Authority (INA), agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun ambiguitas peran antara entitas yang berorientasi komersial dan agen pembangunan. Kejelasan mandat ini perlu diterjemahkan ke dalam indikator kinerja utama yang terukur dan berbeda secara tegas antara fungsi investasi strategis jangka panjang dan penugasan pembangunan yang bersifat non-komersial.

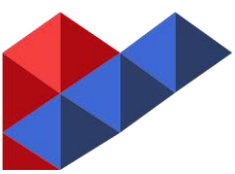




Dalam konteks tersebut, kebijakan investasi Danantara diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah. Diskusi menekankan pentingnya reposisi pemerintah daerah bukan sekadar sebagai penerima dampak kebijakan pusat, melainkan sebagai subjek aktif dan mitra strategis dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan investasi, terutama yang berdampak langsung pada tata ruang, struktur ekonomi regional, dan keberlanjutan lingkungan. Pelibatan daerah secara formal dipandang sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa konsolidasi aset dan investasi nasional benar-benar menghasilkan dampak ekonomi riil di tingkat lokal.

Forum juga menyoroti perlunya penataan ulang batas peran negara dalam kegiatan usaha. Pemerintah pusat didorong untuk secara bertahap menarik BUMN dari sektor-sektor non-strategis yang telah mampu dilayani secara kompetitif oleh sektor swasta, UMKM, dan koperasi, guna menghindari distorsi pasar dan kanibalisasi ekonomi rakyat. Terminasi atau divestasi dari bisnis non-strategis dipandang penting agar sumber daya Danantara dapat difokuskan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak luas terhadap ketahanan ekonomi nasional dan kesejahteraan publik.

Dari sisi tata kelola dan struktur fiskal, diskusi mengemukakan perlunya pembaruan kebijakan yang mendorong keadilan distribusi manfaat investasi. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah reformasi pendaftaran dan pembentukan entitas usaha di lokasi investasi, sehingga manfaat fiskal seperti Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah tidak terkonsentrasi secara administratif di

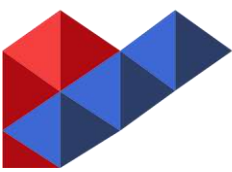




pusat, melainkan mengalir ke daerah tempat kegiatan ekonomi berlangsung. Pendekatan ini dipandang relevan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan Danantara di tingkat lokal.

Selain itu, pemanfaatan aset BUMN yang belum produktif menjadi perhatian strategis. Diskusi mendorong adanya regulasi terobosan, setidaknya setingkat Peraturan Presiden, untuk mempermudah optimalisasi aset idle BUMN bagi kepentingan publik, industri kreatif, dan pengembangan ekonomi daerah. Penyederhanaan regulasi dan koordinasi lintas korporasi negara dipandang krusial agar aset-aset tersebut dapat segera dimobilisasi secara produktif tanpa terhambat oleh fragmentasi kewenangan dan ego sektoral.

Forum menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan yang mampu mencegah politisasi dan penyalahgunaan aset, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi profesional pengelola. Kepastian bahwa keputusan bisnis yang diambil secara profesional, berbasis data, dan akuntabel tidak akan berujung pada kriminalisasi kebijakan dipandang sebagai prasyarat utama untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik dalam pengelolaan Danantara. Dengan kerangka kebijakan yang jelas, tata kelola yang disiplin, serta kemitraan pusat–daerah yang seimbang, pemerintah pusat diharapkan dapat memastikan bahwa Danantara benar-benar berfungsi sebagai instrumen transformasi BUMN yang kredibel, inklusif, dan berkelanjutan.



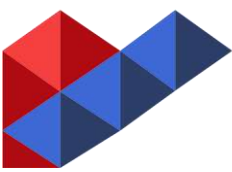


## 2.7 Kesimpulan

Diskusi di Jawa Timur menegaskan bahwa pembentukan Danantara merupakan langkah transformasi kelembagaan berskala besar yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai restrukturisasi korporasi BUMN, melainkan sebagai upaya strategis untuk mereposisi peran negara dalam perekonomian nasional. Melalui konsolidasi aset dan reformasi tata kelola BUMN, Danantara mengandung potensi untuk memperkuat kapasitas investasi negara, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset publik, serta mendukung agenda pembangunan jangka panjang yang tidak sepenuhnya dapat ditopang oleh mekanisme pasar maupun APBN.

Namun demikian, diskusi juga menunjukkan bahwa besarnya skala, fleksibilitas kewenangan, dan sentralisasi pengelolaan aset yang melekat pada Danantara secara inheren membawa risiko sistemik yang signifikan. Risiko tersebut mencakup potensi politisasi dan konflik kepentingan, pencampuran aset produktif dan bermasalah tanpa mekanisme pemulihan yang jelas, kaburnya batas antara fungsi komersial dan penugasan negara, serta kerentanan terhadap kriminalisasi kebijakan yang dapat melemahkan profesionalisme dan keberanian pengambilan keputusan bisnis. Tanpa tata kelola yang disiplin dan pengawasan publik yang kuat, transformasi ini berisiko mereproduksi persoalan struktural lama dalam skala yang lebih besar.

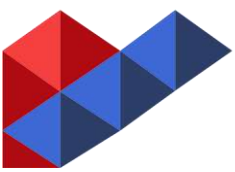
Dari perspektif daerah, diskusi menegaskan bahwa keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari besaran aset yang dikelola atau imbal hasil investasi, tetapi dari kemampuannya menciptakan dampak ekonomi riil yang inklusif dan berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah





daerah sebagai mitra strategis, keberpihakan pada penguatan rantai nilai lokal, serta distribusi manfaat yang adil menjadi prasyarat penting agar konsolidasi di tingkat pusat tidak berujung pada pemusatan nilai tambah dan melemahnya kapasitas ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, FGD ini menyimpulkan bahwa Danantara merupakan kebijakan berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil yang juga tinggi. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kejelasan mandat kelembagaan, konsistensi penerapan prinsip meritokrasi, disiplin tata kelola dan transparansi, serta kemampuan negara menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, dinamika pasar, dan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan prasyarat tersebut, Danantara berpeluang menjadi instrumen transformasi ekonomi nasional yang strategis dan berkelanjutan; sebaliknya, tanpa pondasi tata kelola yang kuat, Danantara berisiko menjadi sumber kerentanan baru dalam pengelolaan aset negara.





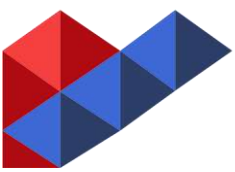
BAB III

DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

3.1 Dokumentasi Kegiatan

Tabel 3.1 Dokumentasi Kegiatan

<p>1. Registrasi Peserta &amp; Penyambutan</p>  <p>Gambar 3.1 Registrasi Peserta</p>	 <p>Gambar 3.2 Registrasi Peserta</p>
<p>2. Pembukaan Acara oleh MC</p>  <p>Gambar 3.3 Pembukaan Acara oleh MC Tri Ambarwati</p>	 <p>Gambar 3.4 Pembukaan Acara oleh MC Tri Ambarwati</p>
<p>3. Pembukaan dan Pengantar Diskusi oleh Host</p>  <p>Gambar 3.5 Pembukaan dan Pengantar Diskusi oleh Dr. Akbar Faizal, M.Si</p>	 <p>Gambar 3.6 Pembukaan dan Pengantar Diskusi oleh Dr. Akbar Faizal, M.Si</p>





4. Pemaparan Hasil Riset oleh Peneliti Nagara Institute



Gambar 3.7 Paparan dari Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H



Gambar 3.8 Paparan dari Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H

5. Pemaparan oleh Narasumber



Gambar 3.9 Paparan dari Bapak Ferry Latuhihin - Pakar Ekonomi



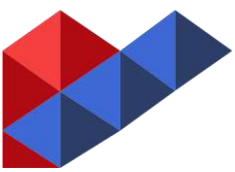
Gambar 3.10 Paparan dari Bapak Emil Dardak - Wakil Gubernur Jawa Timur



Gambar 3.11 Paparan dari Bapak Prof. Imron Mawardi



Gambar 3.12 Paparan dari Bapak Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H - Ketua Komisi XI DPR RI





6. Diskusi Panel dan Tanya Jawab



Gambar 3.13 Tanggapan dari Andi Rahmat



Gambar 3.14 Tanggapan dari Prof. Rachma Gafmy, Ph.D



Gambar 3.15 Tanggapan dari Bapak Eri Cahyadi - Wali Kota Surabaya



Gambar 3.16 Tanggapan dari Bapak Hariyadi B. Sukamdani - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) & Gabung Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)

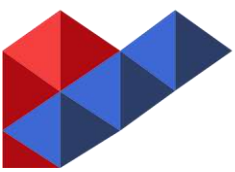
6. Diskusi Panel dan Tanya Jawab



Gambar 3.17 Tanggapan dari Ibu Dra. Chandra Fatmawati - Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur



Gambar 3.18 Tanggapan dari Bapak Luthfil Hakim - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur





### 7. Foto Bersama Narasumber dan Peserta Kegiatan



Gambar 3.19 Foto Bersama



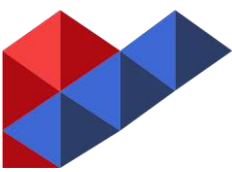
Gambar 3.20 Foto Bersama

## 3.2 Laporan Singkat **Social Media Handling**

### A. Angle Campaign

Fokus narasi yang diangkat dalam konten publikasi meliputi:

- **Substansi & Edukasi: Transformasi Paradigma BUMN:** Mengangkat narasi perubahan besar pengelolaan BUMN dari "entitas politik/birokrasi" menjadi "entitas korporasi profesional" melalui Danantara. Fokus pada edukasi publik mengenai tujuan Danantara untuk meningkatkan efisiensi, investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (target 8%) tanpa membebani negara.
- **Lokalitas & Relevansi: Jawa Timur sebagai Subjek Pertumbuhan:** Menonjolkan aspirasi kuat dari tokoh lokal (Wagub Emil Dardak & Walikota Eri Cahyadi) yang menuntut agar investasi Danantara berdampak riil bagi daerah. Poin kuncinya adalah: Danantara harus menyerap tenaga kerja lokal, menyelesaikan aset BUMN yang *idle* (mangkrak) di daerah (contoh: Kota Lama Sby), dan





menjadikan daerah sebagai "mitra aktif", bukan sekadar lokasi eksploitasi.

- Harapan: Dialog Kritis & Solutif: Memosisikan forum ini sebagai jembatan aspirasi yang "berani dan terbuka" (Uncensored). Menampilkan perdebatan sehat antara skeptisisme ekonom (Ferry Latuhihin) dengan optimisme pembuat kebijakan (Misbakhun), yang berujung pada konsensus bahwa suara daerah akan dikawal dan disampaikan langsung ke Presiden melalui buku hasil diskusi.
- Euforia & Keterlibatan: Menampilkan antusiasme peserta dan suasana interaktif selama acara berlangsung (dokumentasi *on-ground*).
- Testimoni & Perspektif: Mengamplifikasi pendapat positif dari tokoh lokal dan *influencer* terkait kehadiran Danantara.

#### B. Platform Distribusi

Sebaran konten dilakukan melalui ekosistem digital berikut:

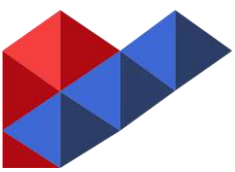
- Instagram: @updatearsip & Akun Influencer (Fitur: Feed & Reels)
- TikTok: @updatearsip (Fitur: Short Video/VT)
- Facebook: (Updatearsip)

#### C. Jumlah Total Post

Total aset konten yang telah dipublikasikan.

Tabel 3.2 Jumlah Total Post

No	Akun/Kategori	Jenis Produksi	Jumlah Produksi
1	Official Akun (@updatearsip)	Grafis/Foto Short Video	3 6



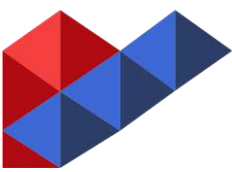


2	Buzzer/Akun Lainnya (Termasuk Clipper)	Short Video	22
Total			30
Total Posting (termasuk mirroring)			42

#### D. Summary Insight

##### Breakdown Distribusi Platform

- TikTok Platform ini menjadi ujung tombak distribusi *campaign* dengan jumlah konten terbanyak (>25 Post). Strategi yang diterapkan adalah *quantity over quality* pada level *buzzer/micro-KOL* untuk menciptakan "gema" isu (echo chamber), sementara akun official @updatearsip fokus pada kualitas visual untuk mendorong algoritma FYP. Pola ini efektif menjangkau audiens *grassroot* dan anak muda yang masif.
- X/Twitter Meskipun hanya memuat satu tautan, masuknya konten melalui akun media Tier 1 Surabaya, Suara Surabaya (@e100ss), memberikan bobot kredibilitas tertinggi (High Impact). Kehadiran di platform ini memvalidasi urgensi acara di mata pemangku kebijakan, jurnalis, dan publik Surabaya yang kritis, membedakannya dari sekadar "konten medsos biasa".
- Instagram Distribusi di Instagram difokuskan melalui fitur Reels pada akun official dan KOL terpilih. Platform ini berfungsi sebagai "etalase" yang menjaga estetika dan *branding* acara, menyasar audiens kelas menengah yang lebih mementingkan kualitas visual dan narasi yang rapi dibanding kuantitas postingan.

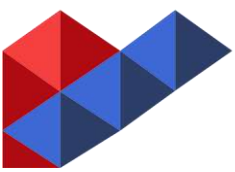




- Facebook Pemanfaatan Facebook Reels bertujuan untuk menyasar demografi usia yang lebih matang (30-45+) yang mungkin tidak terjangkau oleh TikTok. Konten yang didistribusikan merupakan hasil *recycling* dari aset video utama, memastikan efisiensi produksi namun tetap memperluas jangkauan ke audiens umum/komunitas warga.

Untuk akun @updatearsip menjangkau sekitar 123 ribu account reach serta pada instagram menjangkau sekitar 117 ribu account reach, dimana jumlah tersebut masih akan bertambah selama masa publikasi berjalan.

- Echo Chamber: Menciptakan kesan "ramai" di akar rumput. Satu video meledak bisa menutupi performa video lain yang sepi.
- Facebook4Fanpage/ReelsMedium-LowDemografi Matang: Menyasar audiens usia lebih tua yang relevan dengan isu BUMN/Politik.
- Volume vs Reach: Akun-akun *clipper/buzzer* kecil berfungsi efektif sebagai Echo Chamber (menciptakan keramaian/volume posting >35 konten) dan *Social Proof*, namun bukan penyumbang *views* utama.
- Traffic Driver: Lonjakan *traffic* terbesar tetap bertumpu pada akun official (@updatearsip) dan beberapa konten KOL terpilih yang berhasil masuk FYP TikTok.





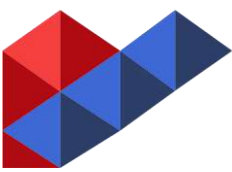
## BAB IV

### PENUTUP

Kegiatan *Round Table Discussion* “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?” telah terlaksana dengan baik dan memberikan masukan yang konstruktif bagi penguatan kebijakan reformasi Badan Usaha Milik Negara. Forum ini menjadi sarana dialog yang efektif dalam menghimpun pandangan dari berbagai pemangku kepentingan terkait peran dan arah transformasi BUMN, khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

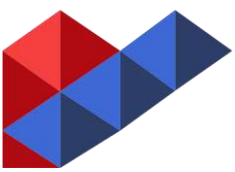
Hasil diskusi menunjukkan pentingnya pelaksanaan reformasi BUMN yang berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan kepentingan daerah. Pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN perlu diiringi dengan pengaturan yang jelas dan terukur agar dapat menjalankan fungsi strategisnya secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian regional, termasuk Jawa Timur.

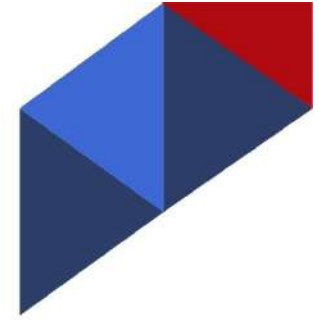
Rekomendasi kebijakan yang dirangkum dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan reformasi BUMN sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan pemerintah daerah serta sinergi antara BUMN dan pelaku usaha daerah perlu terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.





Sebagai penutup, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai rujukan dalam proses pengambilan kebijakan ke depan. Diharapkan kegiatan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyempurnaan kebijakan reformasi BUMN serta mendukung pembangunan ekonomi nasional dan daerah.





# **DAFTAR LAMPIRAN**

- Daftar Hadir Kegiatan
- Laporan PR Value (Media Online, Media Cetak dan TV)
- Laporan Sosial Media Handling
- Laporan Amplifikasi Media Sosial
- Materi Kegiatan

